



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**KOMISI X DPR RI KE KOTA YOGYAKARTA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025**  
**TANGGAL 20—22 NOVEMBER 2024**

---

Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker pertama pada keanggotaan periode 2024—2029 ke Kota Yogyakarta. Kunker pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 tanggal 20—22 November 2024 ini dipimpin oleh MY Esti Wijayati, S.H. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi fokus Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI. Selain itu, Komisi X DPR RI ingin menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka (KM), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Asesmen Nasional.

Kegiatan dimulai dengan kunjungan lapangan ke SMPN 5 Kota Yogyakarta dan SMPN 11 Kota Yogyakarta, didampingi oleh Pj. Walikota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A. Komisi X DPR RI mendapatkan gambaran bahwa setiap satuan pendidikan menerima *input* peserta didik yang beragam, kondisi sarana prasarana yang berbeda, dan kualitas pendidik yang tidak sama. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi proses dan hasil pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 membuat pengaturan PPDB yang disesuaikan dengan kondisi Kota Yogyakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. PPDB masuk ke SMP dilakukan melalui tiga jalur, yaitu jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur khusus. Penentuan zonasi meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki luas hanya 32,5 km<sup>2</sup>. Asesmen Pendidikan Daerah menjadi salah satu alat seleksi PPDB, metode ini dapat diterima oleh masyarakat dan orang tua siswa.

Untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, dibutuhkan pendidik yang mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengusulkan agar Pemerintah c.q Kemendikdasmen membuat skema pelatihan peningkatan keterampilan mengajar yang berkesinambungan bagi semua pendidik. Kebijakan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Hasil Asesmen Nasional tahun 2024, penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik, terutama pada karakter siswa, iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan sekolah, dan iklim inklusivitas sekolah. Terkait wacana ‘menghidupkan’ kembali Ujian Nasional, para pemangku kepentingan Kota Yogyakarta cenderung setuju. Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki karakter yang berbeda, mereka lebih menghargai kompetisi dan prestasi. Hal ini yang mendorong wacana ujian nasional direalisasikan. Proses Ujian Nasional diyakini dapat membangun motivasi dan kompetensi siswa.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan pendidikan di Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta, dan praktik baik yang dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Yogyakarta dapat menjadi *benchmark* bagi daerah lain dan satuan pendidikan lain, sehingga menciptakan banyak sekolah yang unggul.

Yogyakarta, 22 November 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.